

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA WISATA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dhenas Rifqi Wirambara Baehaqi

NPP. 29.0457

Asdaf Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Kebijakan Publik

Email : dhenasrifqi15@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problems/Background (GAP): A tourist village is a form of integration between attractions, accommodation and supporting facilities presented in a structure of community life that is integrated with applicable ordinances and traditions. The tourism village has now become a program of the East Belitung Regency Regional Government which is aimed at increasing tourist attractions and tourist visits by developing the potential and uniqueness of each village in the East Belitung Regency area and in its implementation involves the participation and capabilities of the local community. **Objective:** knowing the supporting factors and obstacles to the implementation of tourism village development policies in East Belitung Regency and the efforts made in building tourism in the tourist village of East Belitung Regency. **Method:** The research method used is to use descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out by observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the research on the Implementation of the Tourism Village Development Policy in East Belitung Regency went quite well. However, there are shortcomings where the Access to the Road to the Tourist Village is still damaged and there is a lack of waterways. Advice to the Culture and Tourism Office, namely by Coordinating with Other Agencies in order to Help the Development of Tourism Villages in East Belitung **Conclusion:** The development of tourism villages has been carried out by the Culture and Tourism Office of East Belitung Regency but has not been optimal because in the process of implementing the policy there are factors that hinder including: clarity of regulations in village development, the magnitude of natural potential for the development and development of tourism villages, high public awareness, assistance from third parties, and inhibiting factors including; poor road access, and lack of human resources with a tourism background.

Keywords: Development, Tourism Village, Department of Culture and Tourism.

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata saat ini telah menjadi program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi dan keunikan pada masing-masing desa di wilayah Kabupaten Belitung Timur serta dalam pelaksanaannya melibatkan keikutsertaan dan kemampuan masyarakat lokal. **Tujuan:** mengetahui faktor

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembangunan desa wisata di Kabupaten Belitung Timur dan upaya yang dilakukan dalam membangun pariwisata di desa wisata Kabupaten Belitung Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur berjalan cukup baik. Namun, ada kekurangan dimana Akses Menuju Jalan menuju Desa Wisata Masih rusak dan kurangnya saluran air. Saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu dengan Berkoordinasi dengan Dinas Lain agar dapat Membantu Pembangunan Desa Wisata Di Belitung Timur. **Kesimpulan:** Pembangunan Desa Wisata telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur namun belum optimal hal ini di karenakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut terdapat faktor-faktor yang menghambat diantaranya: adanya kejelasan peraturan dalam pembangunan desa, besarnya potensi alam untuk pembangunan dan pengembangan desa wisata, kesadaran masyarakat yang tinggi, adanya bantuan dari pihak ketiga, dan faktor penghambat diantaranya; akses jalan yang belum baik, dan kurangnya SDM yang berlatar belakang Pariwisata.

Kata Kunci: Pembangunan, Desa Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pariwisata salah satunya yakni meningkatkan upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak kunjungan Wisata, retribusi parkir, serta pajak iklan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. Masyarakat Desa Wisata juga bisa dapat membantu sebagai penggerak pariwisata dan juga sebagai objek tujuan dalam pembangunan pariwisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata saat ini telah menjadi program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan kunjungan wisatawan dengan mengembangkan potensi dan keunikan pada masing-masing desa di wilayah Kabupaten Belitung Timur serta dalam pelaksanaannya melibatkan keikutsertaan dan kemampuan masyarakat lokal. Salah satu ciri Desa Wisata yakni memiliki kesatuan masyarakat yang berada di tempat yang sama serta saling berinteraksi untuk sama-sama mengelolah tempat tinggalnya menjadi objek kawasan yang mempunyai sebuah potensi Wisata maupun dapat mengembangkan dengan potensi-potensi yang lain. Peran utama masyarakat di Desa Wisata sebagai tuan rumah bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara yakni mampu mencerminkan sikap ramah tamah dari nilai luhur budaya serta bangsa Indonesia.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Desa Wisata Gunung Lumut merupakan Desa Wisata di Limbongan yang memiliki keunikan alam seperti hamparan lumut yang tumbuh banyak di sekitaran gunung lumut. Namun kondisi jalanan untuk mencapai gunung lumut tersebut masih berupa tanah puru atau tanah merah yang belum diaspal yang mengakibatkan debu saat di perjalanan yang dapat mengganggu kenyamanan di perjalanan hal ini berdasarkan penyampaian dari Bapak Juharianto selaku ketua karang taruna Desa Limbongan yang telah penulis wawancarai melalui aplikasi media sosial whatsapp. Selain

itu disampaikan terkait pemandu Wisata yang fasih berbahasa Inggris masih dalam proses pembelajaran bisa dikatakan belum ada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh M. Muarifuddin, 2017, dengan hasil penelitian proses pembangunan dari perencanaan telah adanya aktivitas membatik. Pelaksanaan terciptanya interaksi antara pengrajin dan pembatik yang terjalin hubungan patron-klien. Wujud partisipasi bersumber dari masyarakat lokal dan sistem sosial di luar masyarakat. Penelitian kedua oleh Mahathir Muhammad Iqbal dan Dadieng Kurniawan 2017 dengan hasil penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri. Penelitian ketiga oleh T. Prasetyo Hadi dengan hasil penelitian Dapat digunakannya strategi desa budaya dalam melestarikan budaya lokal supaya tidak punah serta manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman budaya lokal di kalangan generasi muda. Penelitian ke empat oleh Felgi Ramadhani, 2018 dengan hasil penelitian Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan terkait pemerintah desa untuk meningkatkan obyek wisata. Penelitian kelima oleh Itah Marsitah, 2019 dengan hasil penelitian, Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik, Adanya hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa yang antara lain dikarenakan kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi dilakukan upaya seperti penataan fasilitas akomodasi untuk mengatur loket tarif, hotel, hall dan swan boat dan dinas pariwisata serta bekerjasama dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana, promosi di berbagai media cetak maupun elektronik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini berfokus pada pembangunan Desa Wisatanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang penting untuk dilaksanakan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Belitung Timur dan Upaya yang dilakukan dalam membangun pariwisata di Desa Wisata Kabupaten Belitung Timur.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan informan sebanyak 6 orang diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur, Kabid Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Belitung Timur, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gantung, Sekretaris Desa Limbongan, dan 2 orang masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung Pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur

3.1.1 Keputusan Yang Mengatur

Pembangunan desa wisata merupakan salah satu program yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah menurut Undang- Undang No.23 Tahun 2014. Adapun mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah. Bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam mengurus masalah pariwisata adalah dengan membuat kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan daya Tarik wisata terkhusus dalam hal ini adalah terkait desa wisata. Dalam Penetapan Desa Wisata selanjutnya diatur lebih rinci dalam peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Desa Wisata dimana dalam peraturan Bupati Belitung Timur ini memberikan kejelasan mengenai pembangunan Desa Wisata. Melalui program Pembangunan Desa Wisata masyarakat dapat memaksimalkan ketersediaan seluruh potensi lingkungan yang ada dengan memberdayakan warga setempat. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan merumuskan penanganan permasalahan dengan mengangkat potensi lingkungan yang ada dengan sentuhan inovasi agar nantinya tercipta suatu desa wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat luar sehingga secara tidak langsung akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.2 Gambaran Dari Pelaksanaan Kebijakan

Dalam proses penyelenggaraan Desa Wisata Gunung Lumut berpedoman pada beberapa tujuan pembentukan Desa Wisata pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengembangan Desa Wisata Tentang Pembangunan Desa Wisata Di Belitung Timur. Kejelasan dilakukan dengan menginformasikan peraturan yang dibuat dengan jelas kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam peraturan tersebut. Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Kejelasan mengenai petunjuk teknis penetapan desa menjadi desa wisata sangat diperlukan karena desa menjadi diakui karena keberadaan wisata yang menjadi nilai jual kepada pengunjung karena desa wisata sendiri perlu dibangun dan dikembangkan karena potensi desa sendiri beraneka ragam sehingga baik alam, budaya ataupun kuliner menjadi nilai jual kepada pengunjung..

3.1.3 Tujuan Dari Kebijakan

Melihat dari atribut dimensi Program Kerja yaitu tujuan dari kebijakan dalam menentukan apa yang ingin dicapai serta menetapkan tujuan dari kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapainya pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur. Dalam pelaksanaan observasi ketika berada di kantor Dinas Pariwisata, peneliti mengamati bahwa keadaan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Timur terlihat nyaman dan seperti mini wisata di Belitung Timur, Karena di dalam kantor Dinas Pariwisata di bagian dindingnya terdapat penjelasan dan sejarah mengenai wisata yang ada di Kabupaten Belitung Timur serta ada di dalamnya seperti pengetahuan mengenai kebudayaan maupun adat seperti pakaian baju adat pernikahannya dengan di dampingi oleh Bujang dayang Terpilih di Kabupaten Belitung Timur. Yang mana ini merupakan bagian dari program program dari Kepala dinas Pariwisata.

3.1.4 Kegunaan Kebijakan

pemerintah Desa Limbongan telah melakukan penataan tempat dengan baik dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan memang sangat dibutuhkan pada masa seperti sekarang ini, memikirkan keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya adalah tugas dari seluruh masyarakat Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud kali

ini tidaklah hanya semata-mata mengenai ketersediaan sumber daya alam dalam menunjang kehidupan kedepan saja, melainkan berbagai budaya masyarakat setempat yang terus di jaga demi mempertahankan kearifan lokal yang terdapat di Desa Limbongan hingga generasi yang akan datang.

3.2 Faktor Penghambat Pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur

3.2.1 Anggaran

Anggaran merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang suatu kebijakan khususnya dalam pembangunan. Program Desa Wisata ini menggunakan anggaran yang berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek didalamnya, pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Belitung Timur juga dapat dilaksanakan dengan anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat setempat. Bantuan program Desa Wisata, diperoleh suatu desa harus melalui tahapan pengajuan proposal dengan mengirimkan rancangan dari awal program hingga hasil dari program Desa Wisata tersebut kepada pemerintah kabupaten. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan program yang telah dicanangkan tersebut untuk menghindari mangkraknya suatu program Desa Wisata. Penggunaan anggaran tentunya mempengaruhi fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas meliputi bangunan, perlengkapan dan perbekalan. Fasilitas dan sarana prasana di butuhkan dalam pembangunan desa wisata Gunung lumut untuk menunjang dan lebih meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung menikmati wisata Gunung lumut.

3.2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Proses implementasi suatu kebijakan dipengaruhi juga dengan keberadaan sumber daya yang mendukungnya. Dengan adanya sumber daya yang tersedia dapat mempermudah atau justru mempersulit proses pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya yang tersedia mencukupi maka akan mempermudah pelaksanaan kebijakan namun apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi maka akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan khususnya dalam pembangunan desa wisata Gunung Lumut diperlukan adanya sumber daya karena tanpa adanya sumber daya tersebut pembangunan desa wisata tidak akan berjalan dengan baik, karena sumber daya sebagai obyek yang sangat sentral dalam pelaksanaan pembangunan desa wisata haruslah menjadi tonggak pendorong kemajuan pariwisata. Manusia dan potensi alam yang dimiliki desa Gunung Lumut haruslah selalu di kembangkan kearah yang lebih baik sehingga pembangunan dan pengembangannya berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan Hambatan Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur

3.3.1 Membangun Kerjasama Dengan Pihak Ke Tiga Dalam Membangun Desa Wisata

Di dalam setiap kebijakan selalu ada titik lemah atau kelemahan, hal ini tentunya menjadi tantangan dari dinas terkait untuk bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur selalu berupaya agar program ini terus berjalan, sesuai dari kelemahan yang penulis sebutkan yakni terkait anggaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur tentunya akan melakukan Kesiapan terhadap destinasi wisata daerah, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Objek Wisata serta adanya investasi pihak ketiga, untuk pembangunan tersebut perlu disusun rencana pembangunan

kawasan berupa masterplan dan detail Engineering Design (DED) yang diikuti kejelasan lahan serta perlunya sinergi dari berbagai pihak terkait diantaranya antar OPD, Kecamatan, Desa Dan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

3.3.2 Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengatasi Hambatan Pembangunan Desa Wisata

Dalam pelaksanaan kebijakan kemampuan penerjemahan suatu kebijakan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mengaturnya dipengaruhi oleh kompetensi para implementor atau aktor pelaksananya. Jika kompetensi implementor baik maka pelaksanaan kebijakan akan berlangsung dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi jika sebaliknya kompetensi implementor tidak baik maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dikarenakan kurang kompetensi dimiliki implementor dalam menerjemahkan kebijakan yang ada.. Oleh karena itu dalam mengatasi faktor penghambat Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu menekankan dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusiannya. Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan merupakan faktor utama yang dibutuhkan. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat juga melalui peningkatan pendidikan masyarakat disekitarnya. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meningkat. Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diharapkan dapat mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama oleh M. Muarifuddin, 2017, Implementasi Pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan hasil penelitian proses pembangunan dari perencanaan telah adanya aktivitas membatik. Pelaksanaan terciptanya interaksi antara pengrajin dan pembatik yang terjalin hubungan patron-klien. Wujud partisipasi bersumber dari masyarakat lokal dan sistem sosial di luar masyarakat, penelitian ini membahas tentang pengembangan pariwisatanyadan pada penelitian ini membahas tentang pembangunan pariwisatanya. Pada penelitian kedua oleh Mahathir Muhammad Iqbal dan Dadieng Kurniawan 2017, Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang dengan hasil penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor kuliner butuh strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil serta instrumen hukum yang kuat dalam memproteksi UMKM kuliner dalam negeri penelitian tersebut membahas tentang pengembangan wisata kuliner berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang pembangunan destinasi Desa Wisata. Pada penelitian ketiga oleh T. Prasetyo Hadi Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman dengan hasil penelitian Dapat digunakannya strategi desa budaya dalam melestarikan budaya lokal supaya tidak punah serta manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman budaya lokal di kalangan generasi muda penelitian tersebut membahas tentang strategi desa budaya dalam melestarikan budaya lokal sementara pada penelitian ini membahas tentang faktor-faktor serta upaya yang dilakukan guna pembangunan Desa Wisata. Penelitian ke empat oleh Felgi Ramadhani, 2018, Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Potensi Wisata dengan hasil Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan terkait pemerintah desa untuk meningkatkan obyek wisata seperti penataan fasilitas akomodasi untuk mengatur loket tarif, hotel, hall dan swan boat dan dinas pariwisata serta bekerjasama dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana, promosi di berbagai media cetak maupun elektronik. Kemudian pada penelitian ini tidak

membahas secara umum pariwisata tapi hanya berfokus kepada pembangunan suatu destinasi pariwisata di Desa Wisata. Pada penelitian kelima oleh Itah Marsitah, 2019, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan hasil penelitian Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik Adanya hambatan hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa yang antara lain dikarenakan kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan keberadaan desa wisata hambatan-hambatan pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa. Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian, penelitian tersebut memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya yang mana peneliti ambil yaitu pembangunan sedangkan penelitian tersebut lebih ke pengembangannya.

IV. KESIMPULAN

Pembangunan Desa Wisata telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur namun belum optimal hal ini di karenakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut terdapat faktor-faktor yang menghambat. Berikut faktor pendukung dan penghambat yaitu; faktor Pendukung, Adanya kejelasan peraturan dalam pembangunan desa wisata sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata dan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa Wisata, Besarnya potensi alam untuk pembangunan dan pengembangan desa wista, Adanya kesadaran dari masyarakat dalam membantu pembangunan desa wisata dengan membuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Adanya bantuan dari pihak ke tiga seperti pihak swasta sebagai sponsor dalam membantu pembangunan desa wista dan faktor penghambat diantaranya, akses jalan yang belum baik, Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang Pariwisata serta upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Belitung Timur yaitu; Pembangunan dan perbaikan jalan dengan berkoordinasi dengan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas lain seperti Dinas PUPR dan Pemberdayaan sumber daya aparatur dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan yang di butuhkan sebagai penggerak pengembangan desa wisata

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti memfokuskan terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wisata Kabupaten Belitung Timur dengan memberikan saran-saran membangun agar Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur semakin membaik kedepannya dan dapat membantu perekonomian di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Dinasti dan Industri Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kecamatan Gantung, Pemerintah Desa Limbongan dan Masyarakat Desa Limbongan yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nurhajati, N. (2017). *Pembentukan Desa Wisata Pada Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung (Studi di desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal PUBLICIANA, 10(1), 1-22.
- Surnayo. (2018). Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya. (Studi kasus pada kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto).
- Yuliati, E., & Suwandono, D. (2016). *Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Wisata
- Atmoko, T. P. H. (2018). *Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Melestarikan Budaya Lokal di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman*. Media Wisata, 16(1).
- CAHYANINGRUM, A. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). *Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 355-369.
- Masitah, I. (2019). *Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(3), 45-55.
- Muarifuddin, M. (2017). *Implementasi pembangunan desa wisata batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang*. JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 4(1), 51-70.
- Iqbal, M. M., & Kurniawan, D. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Kuliner Kota Malang*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 59-65.
- Ramadhani, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Potensi Wisata (Studi Pada Desa Wisata Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).